

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instabilitas politik dan isu-isu agama di Kawasan Timur Tengah telah membuat kawasan ini sebagai arena perebutan kekuasaan.¹ Instabilitas ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi seperti perang sipil dan reformasi pemerintahan. Dalam fenomena ini, terdapat dua kekuatan besar yang mencoba memperebutkan status hegemon² dalam Kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Iran. Hal ini dapat dilihat sejak Revolusi Iran 1979, di mana dinamika hubungan kedua negara ini yang kompleks dan beberapa konflik yang terjadi di Kawasan Timur Tengah yang tidak lepas dari campur tangan kedua negara ini.³

Dalam perang antara Irak dan Iran, kompetisi kekuasaan regional dapat terlihat antara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi yang merupakan negara dengan mayoritas Sunni, percaya bahwa munculnya pemerintahan Syiah di Irak akan membahayakan otoritas kerajaannya yang juga mengubah pengaruh Saudi di kawasan serta meningkatkan kekuatan regional Iran.⁴ Dengan alasan tersebut, Arab Saudi mendukung Irak yang bertikai dengan Iran dengan menggunakan kebijakan ekonominya.⁵

¹ Tali R. Grumet, *New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry*, University of Denver, 2015, hal. 1

² Hegemoni adalah negara dengan kekuatan besar (*great power*) yang mendominasi negara lainnya dalam suatu sistem. (John Mearsheimer). Dalam penelitian ini sistem yang dimaksud adalah regional.

³ *ibid*

⁴ Ariel Janher, "Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf", *International Affairs Review* Vol. XX No. 3, 2012, hal. 40

⁵ *Ibid*, hal. 41

Pada tahun 1988 di mana perang Irak-Iran masih berlangsung, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran untuk pertama kalinya.⁶ Keputusan tersebut diambil setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di Teheran yang dilakukan masyarakat Iran dengan membakar kantor kedutaan Arab Saudi sehingga menewaskan satu orang diplomatnya. Hubungannya kembali membaik sejak bergantinya Presiden Iran di tahun 1997 ditandai dengan adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Arab Saudi.⁷ Pemutusan hubungan diplomatik untuk kedua kalinya terjadi pada Januari 2016 setelah Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengeksekusi mati ulama Syiah, Nimr al-Nimr, dengan tuduhan mencari bantuan asing atas sikap anti-pemerintahannya.⁸

Tidak hanya pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, persaingan kedua negara ini juga dapat dilihat melalui konflik lainnya yang terjadi di Kawasan Timur Tengah seperti di Suriah, dan Yaman. Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga baik berupa aliansi ataupun kelompok tertentu dari suatu negara atau yang dikenal dengan *Proxy Wars*.⁹ Beberapa negara yang menjadi arena *proxy war* diantaranya adalah Suriah dan Yaman.

Di Suriah, perang sipil yang terjadi antara rezim Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pihak pemberontak yang dikenal dengan *Free Syrian Army* tidak

⁶ Marcheilla Ariesta, *Begini Kronologi Alasan Iran-Arab Saudi Selalu Tidak Akur*, Merdeka.com, <http://www.merdeka.com/dunia/begini-kronologi-alasan-iran-arab-saudi-selalu-tidak-akur.html> diakses pada 21 Agustus 2016

⁷ Anthony H. Cordesman dan Arleigh A. Burke, *Saudi Arabia and Iran*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), (Washington:2001)

⁸ BBC Indonesia, "Arab Saudi Eksekusi Mati Ulama Syiah", http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102_dunia_arabsaudi_eksekusi, diakses pada 24 Juni 2016

⁹ Andrew Mumford, *Proxy Warfare*, Polity Press, 2013, hal. 11

lepas dari keterlibatan Arab Saudi dan Iran. Perang yang telah terjadi sejak tahun 2011 ini mendapat dukungan sebagaimana Iran mendukung pihak Bashar Al-Assad melawan pihak pemberontak, sedangkan Arab Saudi mendukung pihak pemberontak yang mayoritas masyarakatnya Sunni di Suriah.¹⁰ Sejak konflik meletus pada April 2011, Iran mulai memberikan bantuan, pelatihan dan peralatan pengamatan kepada Pemerintahan Suriah.¹¹ Beberapa bulan setelah itu, Iran mulai mengirimkan pasukan militernya secara langsung untuk membantu Pemerintahan Suriah menekan para pemrotes dan pemberontak. Disisi lain, Arab Saudi memulai keterlibatannya dengan himbauan kepada Rezim Assad untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi di Suriah. Untuk melawan pengaruh Iran di Suriah, Arab Saudi meningkatkan dukungannya kepada pihak pemberontak dengan memberikan material senjata dan pelatihan yang telah menghabiskan jutaan dolar.¹²

Di Yaman, perang sipil terjadi antara kelompok minoritas Houthi dengan Pemerintahan Yaman. Kelompok minoritas Houthi merupakan kelompok agama yang menganut sekte Syiah di Yaman. Houthi mulai menjadi radikal setelah invasi Irak pada tahun 2003 dengan slogan anti-Barat dan kemudian menjadi anti-pemerintahan. Tahun 2004 Presiden Ali Abdullah Saleh melihat kelompok Houthi yang dikenal sebagai Ansarallah sebagai penghalang ke pemerintahannya dan menangkap anggotanya.¹³ Isu ini menjadi penting bagi komunitas Syiah, dan Iran mulai mendukung kelompok Houthi dengan memberikan dana dan bantuan

¹⁰ Ashish Kumar Sen, *Proxy War Between Iran Saudi Arabia Playing Out in Syria*, The Washington Times, <http://www.washingtontimes.com/news/2014/feb/26/proxy-war-between-iran-saudi-arabia-playing-out-in/>, diakses pada 21 Agustus 2016

¹¹ Tali R. Grumet, hal. 127

¹² Ibid, hal. 128

¹³ Tali R. Grumet, hal. 103

material.¹⁴ Hal ini membuat Arab Saudi khawatir dan mulai melakukan intervensi militer di Yaman Utara pada tahun 2009.¹⁵

Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik-konflik ini menunjukkan bahwa adanya kompetisi regional terutama antara kedua negara ini. Bagi Arab Saudi, perluasan propaganda Syiah akan membahayakan rezimnya dan otoritas kerajaannya yang menganut Sunni. Sedangkan bagi Iran, keterlibatannya dalam konflik-konflik di Kawasan Timur Tengah merupakan suatu kesempatan baginya untuk memperkuat kekuasaannya di kawasan untuk menghadapi rivalnya, Arab Saudi, terutama mengenai program nuklir Iran.¹⁶

Program nuklir Iran telah dilakukan jauh sebelum revolusi islam terjadi. Namun, pada tahun 2002 program nuklir Iran menjadi sorotan publik ketika Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush menyatakan dalam pidatonya bahwa Iran, Korea Utara dan Irak merupakan bagian dari 'Axis of Evil' (poros kejahatan).¹⁷ Negara-negara tersebut dianggap menjalankan program nuklirnya untuk menciptakan *Weapons of Mass Destruction* (WMD) atau senjata pemusnahan masal yang menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dunia.¹⁸ Pada tahun 2003 *International Atomic Energy Agency* (IAEA) menemukan adanya aktifitas nuklir secara rahasia di Natanz dan di Arak. Hal ini membuat IAEA menyatakan bahwa Iran tidak relevan dalam memberikan informasi

¹⁴ Ibid, hal. 104

¹⁵ Ibid, hal. 105

¹⁶ Ghadah Alghunaim, *Conflict Between Saudi Arabia and Iran: An Examination of Critical Factors Inhibiting their Positive Role in the Middle East*, Department of Conflict Resolution Studies Theses and Dissertation, Nova Southeastern University, 2014, Hal. 82

¹⁷ Nazir Hussain and Saina Abdullah, "Iran nuclear deal: Implications for Regional Security", *Journal of Political Studies*, Vol.22, Issue-2, (2015): hal 578

¹⁸ Ibid, hal 578

mengenai program nuklirnya.¹⁹ IAEA juga meragukan adanya kemungkinan program nuklir tersebut digunakan untuk keperluan militer Iran mengingat program nuklir di Natanz dan Arak tidak dimonitori perkembangannya oleh IAEA. Hal ini yang membuat program nuklir Iran mulai menjadi isu internasional dan mulai diperbincangkan secara serius dengan adanya inisiatif dari Perancis, Inggris dan Jerman (EU3) mengenai aktifitas nuklir Iran tersebut.²⁰

Isu Nuklir Iran ini membuat Iran mendapatkan sanksi internasional salah satunya yaitu embargo minyak oleh Amerika Serikat dan Eropa.²¹ Terlebih lagi sanksi yang diberikan Amerika Serikat menjelaskan jika suatu perusahaan bekerja sama dengan Iran dalam sektor energi maka perusahaan tersebut tidak bisa bekerjasama dengan Amerika Serikat.²² Sanksi ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negaranya mengingat minyak dan gas adalah sumber pendapatan paling penting bagi Iran. Hal ini membuat perekonomian negara tersebut tertekan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat inflasi di Iran naik hingga 40% termasuk harga kebutuhan pokok dan juga meningkatkan tingkat pengangguran menjadi 10,3% setelah sanksi diberikan.²³

Tahun 2006 menjadi titik awal perbincangan nuklir Iran dengan negara-negara besar di dunia yang dikenal sebagai P5+1 atau EU+3 yaitu, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Perbincangan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan sementara di mana pada 24 November 2013

¹⁹ Xiaoning Huang, "The Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses and The Future", (Sabbatical Leave Report; Department of Political Affairs, Middle East and West Asia Division, 2016), hal 4.

²⁰ Ibid, hal 5

²¹ Gary Samore, "Sanctions Against Iran: A Guide to Targets, Terms, and Timetables", Belfer Center For Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 2015, hal. 12

²² Gary Samore, hal 4.

²³ Nazir Hussain and Saina Abdullah, hal 584.

ditetapkan bahwa Iran dapat menjalankan teknologi nuklirnya dengan syarat pengayaan uranium tidak lebih dari 5%, tidak meningkatkan cadangan 3,5% uranium yang diperkaya dan setuju untuk meningkatkan pengawasan program nuklirnya.²⁴

Pada tanggal 14 Juli 2015, Iran dan P5+1 mencapai kesepakatan “*Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*” di Wina untuk memastikan bahwa program nuklir Iran akan menjadi eksklusif damai.²⁵ Dalam kesepakatan ini, Iran diharuskan untuk bersikap transparan dengan mengizinkan IAEA untuk memonitor pembangunan program nuklirnya.²⁶ Kesepakatan JCPOA merupakan hasil dari usaha yang dilakukan Iran untuk menyakinkan negara *world power* mengenai pengembangan nuklirnya. Poin penting yang harus diingat adalah bahwa JCPOA menyebabkan adanya penghapusan sanksi internasional yang dibuat oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat terhadap Iran. Salah satu sanksi internasional yang dihapuskan adalah pencabutan sanksi embargo minyak Iran.

Dengan adanya perjanjian JCPOA Arab Saudi menganggap Iran akan menjadi negara *great power* yang mengancam pencapaian hegemoninya di kawasan Timur Tengah jika Iran memiliki sistem nuklirnya sendiri. Sebagaimana menurut John Mearsheimer, jika suatu negara hegemon memiliki kompetitor

²⁴Center for Strategic and International Studies, *The JCPOA Timeline* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2016), <http://jcpoatimeline.csis.org/> (diakses pada 25 Juni 2016).

²⁵ European External Action Service, *Joint Comprehensive Plan of Action*, (Vienna: EEAS, 2015), hal 2. https://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf

²⁶ European External Action Service, hal 9.

hegemon dalam kawasan yang sama, maka tidak ada lagi *status quo*.²⁷ Artinya, tidak ada negara hegemon pada kawasan tersebut.

Ketakutan Arab Saudi ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir dalam wawancaranya dengan CNN terkait kesepakatan nuklir Iran;

*Saudi Arabia will do whatever it takes to protect the nation and the people from any harm.... We don't have confidence in Iran.....Saudi Arabia will not allow Iran to undermine our security or the security of our allies, we will push back against attempts to do so.*²⁸

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa nuklir Iran yang dilegitimasi oleh P5+1 membuat Arab Saudi merasa keamanannya terancam. Menlu Jubeir juga mengatakan bahwa Arab Saudi khawatir Iran akan mendukung kelompok terorisme dan menyebabkan instabilitas di kawasan.²⁹ Kekhawatiran Arab Saudi lainnya yaitu keterbukaan negara barat dengan Iran dimana Amerika yang merupakan aliansi dan rekan dekat Arab Saudi, akan menjalin hubungan lebih dekat dengan Iran sehingga Amerika akan mulai meninggalkan Arab Saudi. Jika Amerika menjalin hubungan baik dengan Iran, Saudi takut bahwa Amerika akan mengesahkan hegemoni Iran di Suriah.³⁰ Selain itu, legitimasi nuklir Iran akan membuat Amerika melakukan inspeksi perkembangan situs atomnya dan sebagai gantinya Amerika akan memperbolehkan aliansi Iran mendominasi negara-negara

²⁷ John J. Mearsheimer, *"The Tragedy of Great Power Politics"*, University Of Chicago, First Edition, 2001, hal. 42

²⁸ CNN Politics, "Saudi foreign minister deeply skeptical of Iran deal," <http://edition.cnn.com/2016/01/19/politics/situation-room-saudi-arabia-foreign-minister/>, diakses pada 11 Januari 2017

²⁹ *ibid*

³⁰ Gareth Porter, "Will Iran Nuclear Deal Change US's Middle East Politics?", Middle East Eye, <http://www.middleeasteye.net/columns/will-iran-nuclear-deal-change-americas-middle-east-politics-552529855>, diakses pada 23 November 2016.

Arab seperti di Lebanon dan Irak.³¹ Mengingat *proxy war* yang masih tetap berlangsung di Kawasan Timur Tengah, hal ini menjadi bukti bahwa ancaman yang timbul dari kesepakatan nuklir ini dapat mengancam posisi Arab Saudi di kawasan ini.

Dari penjabaran tersebut muncul hal menarik untuk diteliti terkait dengan tindakan Arab Saudi dalam merespon ancaman yang ditimbulkan oleh Iran mengingat program nuklir Iran telah menjadi hal yang legal.

1.2 Rumusan Masalah

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang memiliki peran besar di Kawasan Timur Tengah yang memiliki pandangan politik yang bersebrangan. Perebutan kekuasaan di Kawasan Timur Tengah membuat kedua negara ini seringkali terlibat dalam konflik-konflik yang terjadi di kawasan. Kepemilikan Iran akan nuklir dan telah dilegitimasi dalam JCPOA membuat Arab Saudi merasa terancam akan eksistensinya di Kawasan Timur Tengah. *Proxy wars* yang masih berlangsung di beberapa negara Arab menjadi hal yang sangat dipengaruhi oleh kesepakatan ini. Selain itu, Arab Saudi merasa terancam akan pengaruh Iran di masa mendatang mengingat adanya kesempatan Iran untuk menjalin hubungan dengan Amerika dan Eropa. Jika Amerika menjalin hubungan baik dengan Iran, Saudi takut bahwa Amerika akan mengesahkan hegemoni Iran di Suriah. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat respon Arab Saudi sebagai rivalnya dalam menanggapi kesepakatan nuklir yang dilihat Saudi sebagai ancaman bagi negaranya.

³¹ Angus McDowall, "Insight: Saudis Brace for 'Nightmare' of US-Iran Rapprochement", Reuters, <http://www.reuters.com/article/us-saudi-usa-iran-insight-idUSBRE9980IT20131009>, diakses pada 23 November 2016

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana respon Arab Saudi dalam menghadapi kesepakatan nuklir Iran tahun 2013-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan tindakan negara yaitu Arab Saudi dalam merespon ancaman Iran terkait kesepakatan nuklir yang tercapai pada tahun 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Adanya manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman mengenai sikap Arab Saudi dalam merespon ancaman Iran dengan menggunakan konsep *Balance of Threat*.
2. Menambah referensi dan kepastakaan Ilmu Hubungan Internasional mengenai dinamika politik Kawasan Timur Tengah khususnya Respon Arab Saudi mengenai kesepakatan nuklir Iran.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tulisan yang terkait akan topik yang diangkat penulis sebagai referensi dalam proses penelitian ini. Tulisan tersebut terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan thesis yang dapat menjadi penyokong *valid* untuk paparan dalam penelitian ini. Berikut beberapa studi pustaka yang penulis gunakan, yang pertama, “*New Middle East Cold War:*

*Saudi Arabia and Iran's Rivalry*³² yang ditulis oleh Tali Rachel Grumet pada tahun 2015. Dalam thesis ini penulis menjabarkan hubungan kedua negara dari sebelum revolusi Iran hingga *Arab Springs* dengan menggunakan teori perang dingin. Dijelaskan bahwa hubungan kedua negara ini tidak terlepas dari kompetisi dominasi regional di Timur Tengah. Untuk mencapai dominasi tersebut kedua negara menjadi terlibat dalam dinamika politik kawasan. Seperti terlibat dalam perang ataupun konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Selain terlibat secara langsung, Saudi dan Iran juga menggunakan konsep *proxy wars* untuk meminimalisir biaya perang serta kerusakan bagi negaranya. *Proxy wars* dan intervensi militer yang melibatkan Saudi – Iran sudah dilakukan di Bahrain, Suriah, Irak, dan Yaman. Selain Proxy Wars, penulis juga memaparkan mengenai isu nuklir Iran yang mengancam keamanan regional, terutama pengaruh Arab Saudi.

Perbedaan “*New Middle East Cold War*” *Saudi Arabia and Iran's Rivalry*” dengan penelitian ini adalah dalam thesis ini penulis memaparkan dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran, dan menjelaskan bagaimana nuklir Iran mempengaruhi stabilitas politik Arab Saudi.

Tulisan kedua adalah “*Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf*”³³ yang ditulis oleh Ariel Jahner, pada tahun 2012. Tulisan ini memaparkan bagaimana dinamika hubungan antara Arab Saudi dengan Iran semenjak sebelum Revolusi Iran pada tahun 1979 terjadi hingga pada saat *Arab*

³² Tali R. Grumet, “New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran’s Rivalry”, University of Denver, 2015

³³ Ariel Janher, “Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf”, *International Affairs Review* Vol. XX No. 3, 2012

Spirng terjadi pada tahun 2011. Dijelaskan bahwa sebelum revolusi 1979 hubungan kedua negara ini tidak menekankan akan perbedaan sektarian, melainkan hubungan bersahabat dengan sistem pemerintahan yang serupa. Disini penulis menyampaikan bahwa kesuksesan Revolusi Islam di Iran menunjukkan bahwa segala hubungan antara Shah dan kerajaan al-Saud yang telah bersatu menjadi bersebrangan. Sepuluh tahun pasca revolusi, hubungan tersebut semakin merenggang hingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1988. Saudi Arabia melihat Iran sebagai ancaman dengan ideologi Khomeini di kawasan. Oleh karena itu, pada saat perang Iran – Irak, Saudi mendukung Irak dalam melawan Iran dengan didasari ketakutannya bahwa Propaganda Iran bertentangan dengan kerajaannya dan membahayakan rejim dan otoritasnya. Namun, pada tahun 1990 dimana perang Iran-Irak masih berlangsung, hubungan antara Iran-Saudi mulai mendingin. Adanya invasi di Kuwait oleh pasukan Iraq, membuat Saudi beralih untuk beraliansi dengan Iran. Saudi melihat bahwa Irak merupakan bahaya yang lebih besar bagi keamanan negaranya dibandingkan Iran. Namun hubungan tersebut kembali membaik pada tahun 1991.

Perbedaan “*Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf*” dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana tindakan Arab Saudi dalam menghadapi isu nuklir Iran.

Jurnal selanjutnya adalah “*Iran Nuclear Deal: Implications for Regional Security*”.³⁴ Dalam tulisan ini penulis menjelaskan dinamika program nuklir Iran, dari sejak mendapatkan tekanan pada tahun 2002 hingga tercapainya kesepakatan

³⁴ Nazir Hussain and Saina Abdullah, “Iran nuclear deal: Implications for Regional Security”, *Journal of Political Studies*, Vol.22, Issue-2, (2015)

pada tahun 2015. Penulis juga menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya akan berdampak pada negara-negara di Kawasan Timur Tengah, tapi juga akan dirasakan oleh negara-negara di luar kawasan. Kesepakatan nuklir Iran menandai adanya perubahan-perubahan singkat di sejumlah faktor, tidak hanya di skala internasional tapi juga memberikan perubahan akan dinamika perubahan kekuatan di Kawasan Timur Tengah. Kesepakatan ini telah memicu berbagai reaksi dan satu hal yang pasti bahwa kesepakatan ini akan membentuk kembali interaksi antara negara di kawasan tersebut termasuk kebijakannya. Implikasi akan kesepakatan ini tidak hanya untuk hubungan diplomatik tetapi juga untuk strategi, geopolitik serta faktor ekonomi. Namun tidak dapat diprediksi berapa banyak negara yang akan terlibat dalam skenario ini karena terdapat beberapa faktor yang terlibat yang dapat membuat hubungan diplomatik mereka terputus. Tetapi hampir semua negara Timur Tengah akan mencoba mempengaruhi karena sebagian besar negara memiliki pola interaksi yang berbeda terutama negara-negara yang dianggap pemegang power di dinamika Timur Tengah seperti Israel, Iran dan Arab Saudi.

Perbedaan “*Iran Nuclear Deal: Implications for Regional Security*” dengan penelitian ini adalah tulisan ini hanya memaparkan bagaimana dampak kesepakatan nuklir Iran terhadap keamanan Kawasan Timur Tengah dan tidak menjelaskan bagaimana tindakan Arab Saudi dalam menghadapinya.

Jurnal keempat adalah “*The Days after the deal: regional responses to a final nuclear agreement*” tahun 2014.³⁵ Jurnal ini digunakan penulis untuk melihat bagaimana usaha yang dilakukan Arab Saudi sebelum JCPOA tercapai. Dalam

³⁵ Dalia Dassa Kaye dan Jeffrey Martini, “*The Days after the deal: regional responses to a final nuclear agreement*”, RAND Corporation

jurnal ini, yang dijelaskan adalah respon potensial dari dua aktor terpenting di kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Israel. Respon regional terhadap hasil akhir dari perjanjian nuklir Iran, Israel dan Arab Saudi muncul mengingat mereka adalah aktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari perjanjian tersebut. keduanya juga melihat Iran sebagai rival yang memiliki ancaman lebih besar di kawasan dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Israel dan Arab Saudi juga negara yang paling khawatir mengenai kesepakatan sementara ini dan prospek kedepannya, namun belum tentu kesepakatan ini akan menyebabkan adanya *detente* antara Iran dengan Barat.

Perbedaan “*The Days after the deal: regional responses to a final nuclear agreement*” dengan penelitian ini adalah jurnal ini hanya memaparkan respon regional secara umum, tidak secara spesifik terutama Arab Saudi.

Jurnal terakhir yaitu “*The Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses and The Future*” oleh Xiaonig Huang. Jurnal ini menjelaskan dinamika program nuklir Iran sejak awal dimulai hingga menjadi isu internasional. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa isu nuklir Iran akan membuat negara teluk merasa terancam akan eksistensi Iran terutama bagi dua rival utamanya yaitu Arab Saudi dan Israel. Selain itu, isu nuklir ini juga menyebabkan dilema yang dirasakan Amerika Serikat pada perbincangan resmi apakah akan membicarakan program nuklir saja atau akan membicarakan isu lain juga. Mengingat adanya tiga pertimbangan, pertama isu nuklir merupakan masalah yang rumit yang membutuhkan banyak teknis dan pekerjaan yang panjang. Kedua, P5+1 telah dibagi atas isu regional, sehingga membawa isu Suriah akan menyebabkan perpecahan jika isu tersebut diangkat. Ketiga, Supreme Leader Iran

mengatakan bahwa perbincangan nuklir seharusnya hanya menyepakati isu nuklir. Disisi lain, penulis juga menjabarkan usaha yang dilakukan Arab Saudi untuk menolak kesepakatan nuklir ini. Usaha-usaha yang dilakukan Arab Saudi ini telah menghabiskan jutaan dolar mengingat jika kesepakatan tercapai, Iran akan dengan bebas menambah anggaran militernya yang dapat dikirimkan ke aliansinya di Suriah.

Perbedaan “*The Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses and The Future*” adalah jurnal ini hanya memaparkan bagaimana Arab Saudi menghadapi dilema dan memaparkan kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh Arab Saudi.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Hegemoni Regional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berpikir dari John Mearsheimer mengenai Hegemoni Regional di mana Arab Saudi sebagai negara *great power* yang menginginkan status hegemon di Kawasan Timur Tengah, sedangkan Iran muncul sebagai kompetitornya. Negara *great power* dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi dan kapabilitas militer suatu negara. Dalam realisme *Power* di sini dibagi menjadi dua yaitu *absolute power* dan *relative power*. *Absolute power* dapat dilihat dari jumlah kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan kemampuan lainnya yang dimiliki negara.³⁶ Sedangkan *relative power* merupakan kemampuan relatif atau kemampuan negara dalam mempengaruhi negara lain. Martin Weight mengatakan bahwa negara *great power* merupakan

³⁶ Paul R Viotti, Mark V Kauppi, *International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, Allyn and Bacon A Viacom Company, United States of America, 1987, hal 64

negara yang memiliki kemampuan untuk menyatakan perang melawan kelompok dominan *power* lainnya atau negara tunggal.³⁷

Mearsheimer mengatakan bahwa negara *great power* akan mengembangkan kekuatannya dengan tujuan menjadi negara hegemon.³⁸ Hegemoni merupakan satu-satunya negara *great power* yang mendominasi dalam suatu sistem. Sistem yang dimaksud umumnya diinterpretasikan seluruh dunia. Namun, Mersheimer mengatakan bahwa faktanya tidak ada negara yang bisa menjadi *global hegemon*. Hal yang paling memungkinkan bagi *great power* adalah dengan menjadi hegemoni regional di mana negara *great power* dapat mengontrol negara lain yang berada dalam suatu wilayah yang berdekatan dengannya.

Negara yang mencapai status hegemoni regional akan berupaya untuk mencegah adanya *great power* yang muncul karena negara hegemon tidak ingin ada negara lain yang dapat menyamai kekuatannya. Secara ringkas, situasi ideal bagi negara *great power* adalah dengan menjadi satu-satunya negara hegemon di suatu kawasan, karena hal tersebut akan memberikan status quo bagi negara hegemon dan memudahkannya untuk melakukan pembagian kekuasaan di kawasan tersebut. Akan tetapi, jika negara hegemon tersebut memiliki kompetitor hegemon lain di kawasan yang sama, maka tidak ada lagi *status quo*. Oleh karena itu, setiap negara hegemon akan berupaya untuk melemahkan negara kompetitor dan bahkan menghancurkannya. Logika berpikir ini menjadi dasar tindakan

³⁷ Jonathan Rynn, "The Power To Create Wealth: A Systems-Based Theory of The Rise and Decline of The Great Power In The 20th Century", *The City University of New York*, 2001, hal. 6

³⁸ John J. Mearsheimer, "*The Tragedy of Great Power Politics*", University Of Chicago, First Edition, 2001, hal. 40

negara hegemon sehingga setiap negara akan melakukan kompetisi keamanan yang sengit diantara mereka.

Upaya negara hegemon untuk melemahkan bahkan menghancurkan ini yang akan digambarkan oleh penulis sebagai respon suatu negara terhadap ancaman tersebut.

1.7.2 *Balance of Threat*

Aliansi umumnya dipandang sebagai respon untuk sebuah ancaman, meskipun banyak perdebatan mengenai respon yang akan dilakukan. Asumsi utama dalam *balance of threat*, ketika suatu negara muncul dan khususnya nampak berbahaya, respon optimal negara adalah dengan membuat beberapa negara lainnya ikut berupaya untuk membatasi atau mengekang bahaya dari negara tersebut.³⁹ Negara akan membentuk aliansi untuk menyeimbangkan ancaman yang diterima negaranya. Menurut Stephen M. Walt, untuk merespon ancaman yang dirasakan suatu negara, negara akan melakukan aliansi dengan dua cara yaitu *Balancing* dan *Bandwagoning*. Namun, sebelum menentukan respon negara apakah negara tersebut menggunakan *balancing* atau *bandwagoning*, perlu untuk diketahui beberapa faktor yang dapat menentukan level ancaman yang ditimbulkan suatu negara⁴⁰, yaitu:

1. *Aggregate Power*, (Kekuatan Keseluruhan), dapat diasumsikan bahwa ancaman berasal dari sumberdaya terbesar yang dimiliki suatu negara seperti populasi, Industri dan kapasitas militer, dan teknologi. *Aggregate Power* berpotensi menjadi ancaman terbesar bagi negara lain. Untuk

³⁹ Stephen M. Walt, "Keeping the World "Off-Balance": Self-Restraint and U.S Foreign Policy", hal. 134

⁴⁰ Yale Journal of International Affairs, "Balancing Threat: The United States and The Middle East: An Interview with Stephen M. Walt", Yale Journal of International Affairs, 2010

merespon ancaman ini negara juga akan meningkatkan kekuatan agregatnya.

2. *Geographic Proximity*, yaitu kedekatan geografis. Negara yang dekat secara geografis lebih besar menimbulkan ancaman dibandingkan dengan negara yang jauh secara geografis. Dalam merespon ancaman ini negara akan beraliansi dengan negara tertentu dalam wilayah yang sama.
3. *Offensive Capabilities*, (kemampuan serangan) di mana negara dengan kapabilitas *offensive* yang besar dan memiliki potensi menyerang, dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang memiliki kemampuan militer dan *defensive* yang hanya untuk melindungi teritorial negaranya.
4. *Offensive Intentions*, (keinginan menyerang) di mana keinginan negara untuk menyerang dapat dilihat dari agresivitas suatu negara. Negara yang agresif cenderung mudah memprovokasi negara lain agar mengimbangi negaranya. Oleh karena itu, negara dengan keinginan menyerang yang kuat cenderung menjadi ancaman bagi negara lainnya.

Keempat indikator diatas digunakan untuk mendeskripsikan ancaman yang di terima suatu negara. Namun, untuk merespon ancaman tersebut, negara akan melakukan aliansi. Ketika beraliansi, negara akan memilih untuk *balance*, yaitu beraliansi dengan oposisi negara yang membuat ancaman, atau *bandwagon*, yaitu beraliansi dengan negara yang membuat ancaman tersebut. Stephen M.Walt mengatakan dalam sistem internasional, jika *balancing* adalah tindakan paling umum yang dipilih suatu negara dibandingkan *bandwagoning*, maka negara tersebut lebih aman karena negara yang membuat ancaman akan menghadapi

berbagai macam perlawanan dari oposisinya. Namun, jika *bandwagoning* lebih cenderung dominan, maka keamanan akan sulit dicapai karena negara yang membuat ancaman merasa dihargai.⁴¹ Kedua hipotesis ini dapat dilihat dari perilaku baik *balancing* maupun *bandwagoning* itu sendiri.

1.7.2.1 Balancing Behavior

Penyataan bahwa negara akan membentuk aliansi untuk menghindari adanya dominasi dari kekuatan besar, lahir dari teori tradisional *Balance of Power*.⁴² Berdasarkan hipotesis tersebut, negara membentuk aliansi untuk melindungi dirinya dari negara atau suatu koalisi superior yang dapat menimbulkan ancaman. Terdapat dua rasionalisasi mengapa suatu negara memilih untuk melakukan *balancing*.

Pertama, jika negara memutuskan untuk beraliansi dengan kekuatan yang dominan, atau pihak yang menimbulkan ancaman, berarti memberikan kepercayaan kepada pihak tersebut untuk terus melanjutkan perbuatannya (ancamannya). Hal ini menjadi tolak ukur dasar bagi negara sehingga strategi paling aman bagi suatu negara adalah untuk bergabung dengan aliansi negara yang tidak siap menerima dominasi untuk menghindari dominasi dari negara yang menimbulkan ancaman.

Kedua, ketika negara memutuskan untuk *balancing*, terdapat dua pilihan membentuk aliansi. Pertama, negara akan bergabung dengan kelompok yang memiliki kekuatan yang cenderung sama dengan negaranya atau lebih lemah. Hal

⁴¹ Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security*, Spring 1985, Vol. 9 No. 4, President and Fellow of Harvard College and of the Massachusetts Institute of Technology, hal. 4

⁴² *Ibid*, hal. 5

ini akan mempermudah negara mendominasi kelompok ini karena pihak yang lebih lemah membutuhkan bantuan besar. Kedua, beraliansi dengan kelompok negara yang kuat. Jika negara bergabung dengan kelompok yang kuat, hal ini akan mengurangi pengaruh negara tersebut dan akan tetap menjadi lemah. Oleh karena itu, negara akan cenderung untuk beraliansi dengan kelompok pertama.

1.7.2.2 Bandwagoning Behavior

Dalam *bandwagoning*, negara akan cenderung memilih beraliansi dengan negara berkekuatan besar, atau negara yang menimbulkan ancaman.⁴³ Walt memandang dalam *bandwagoning*, negara tertarik akan kekuatan. Kekuatan ini akan membentuk citra negara yang mempengaruhi negara lain untuk beraliansi dengan negara tersebut. Semakin kuat suatu negara dan semakin baik dalam memperlihatkannya ke negara lain, maka akan semakin tertarik negara lain untuk beraliansi. Dalam hal ini, terdapat dua logika dalam *bandwagoning*.

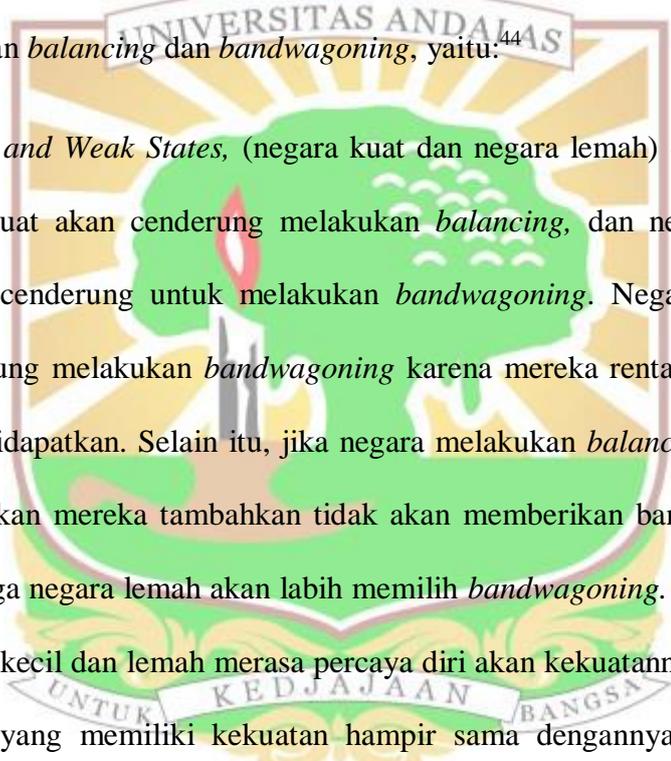
Pertama, *bandwagoning* dapat diadopsi sebagai bentuk peredaan. Dengan memutuskan untuk beraliansi atau berkoalisi dengan negara yang membuat ancaman, *bandwagoneer* (negara yang melakukan *bandwagoning*) berharap untuk menghindari serangan terhadapnya dengan mengalihkan serangan tersebut ke tempat lain jika memungkinkan. Dalam hal ini, *bandwagoning* dipilih untuk alasan *defensive*, sebagai cara untuk menghadapi ancaman potensial.

Kedua, suatu negara biasanya melakukan *bandwagoning* dalam situasi perang, di mana negara akan beraliansi dengan pihak dominan dengan tujuan untuk berbagi kemenangan. Selain itu, dalam *bandwagoning* dunia akan menjadi

⁴³ Stephen M. Walt, hal. 6

lebih kompetitif. Jika negara cenderung untuk beraliansi dengan negara yang terkuat (*great power*) dan paling ditakuti atau negara yang menimbulkan ancaman, maka negara tersebut akan disegani. Mereka akan semakin kuat dan memiliki potensi membahayakan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan persaingan internasional akan semakin intens karena kekalahan dalam suatu sisi akan mempengaruhi sisi lainnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator untuk mengetahui kapan negara akan melakukan *balancing* dan *bandwagoning*, yaitu:⁴⁴

- 
- a) *Strong and Weak States*, (negara kuat dan negara lemah) di mana negara yang kuat akan cenderung melakukan *balancing*, dan negara kecil dan lemah cenderung untuk melakukan *bandwagoning*. Negara lemah akan cenderung melakukan *bandwagoning* karena mereka rentan akan tekanan yang didapatkan. Selain itu, jika negara melakukan *balancing*, kapabilitas yang akan mereka tambahkan tidak akan memberikan banyak perbedaan sehingga negara lemah akan lebih memilih *bandwagoning*. Namun, ketika negara kecil dan lemah merasa percaya diri akan kekuatannya menghadapi lawan yang memiliki kekuatan hampir sama dengannya, maka negara tersebut memungkinkan untuk melakukan *balancing*. Selain itu, negara lemah mungkin akan melakukan *balancing* terhadap negara lemah lainnya. Namun, negara lemah akan *bandwagoning* ketika berhadapan dengan *great power*. Untuk menentukan negara termasuk dalam kategori *strong* atau *weak*, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan Michael I. Handel yaitu dengan melihat *Gross Domestic Product (GDP)*, GDP per

⁴⁴ Ibid

kapita, anggaran belanja militer dan jumlah pasukan bersenjata, cadangan energi, serta produksi dan konsumsi.⁴⁵

b) *The Availability of Allies*, (ketersediaan aliansi) di mana negara juga akan melakukan *bandwagoning* ketika tidak ada negara yang dapat dijadikan aliansi dan negara tidak percaya diri akan kapabilitas yang dimilikinya untuk melakukan *balancing*. Namun, meskipun terdapat sekutu potensial dalam wilayah yang sama, negara lemah lebih cenderung memilih untuk *bandwagoning* karena negara lemah akan menjadi target utama untuk diserang mengingat negaranya yang rentan, atau jauhnya jarak sekutu potensial secara geografis.

c) *Peace and War*, (damai dan perang) dimana dalam keadaan perang, negara kecil dan lemah akan cenderung untuk melakukan *bandwagoning* kepada *great power*. Karena ketika *great power* tersebut menang, negara kecil berharap akan mendapatkan bagian atas kemenangan *great power*. Sedangkan dalam keadaan dimana perang tidak meletus, negara akan cenderung melakukan *balancing* untuk mencegah ancaman akan semakin mendominasi. Dalam hal ini, Walt memandang perang dalam artian tradisional yaitu di mana terdapat dua kelompok atau lebih yang bertentangan secara langsung dengan menggunakan kekerasan.

Dari pemaparan konsep di atas, penulis akan menganalisis bagaimana respon Arab Saudi baik dalam *balancing* atau *bandwagoning* terkait ancaman yang ditimbulkan dari kesepakatan JCPOA pada BAB IV.

⁴⁵ Svetlana Durdevic-Lukic, "Bringing The State Back: Strong Versus Weak States", *Institute of International Politic dan Ekonomi*, 2006.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai suatu cara untuk menyelidiki dan memahami suatu fenomena yang akan diteliti.⁴⁶ Dalam hal ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana respon Arab Saudi dalam menghadapi kesepakatan nuklir Iran dengan P5+1 pada tahun 2013-2016.

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan respon Arab Saudi adalah dari tahun 2013 di mana kesepakatan sementara nuklir Iran atau *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dicapai sampai tahun 2016 dimana JCPOA mulai di implementasikan. Namun, penulis menggunakan literatur mengenai sejarah hubungan kedua negara Iran dan Arab Saudi untuk menjabarkan dinamika hubungan kedua negara tersebut sehingga dapat menjadi salah satu faktor respon Arab Saudi mengenai kesepakatan JCPOA antara Iran dengan negara P5+1 (Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Russia, Perancis, dan Jerman).

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dipaparkan dan dijelaskan.⁴⁷ Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis yang akan diteliti.⁴⁸ Tingkat analisis adalah hal yang menjadi landasan akan suatu pengetahuan.

⁴⁶ John W. Cresswell, *Fourth Edition Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Universitas Nebraska, Lincoln: Sage Publications, 2013), hal. 32

⁴⁷ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 35

⁴⁸ *ibid*

Berdasarkan pemaparan tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Arab Saudi. Sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kesepakatan nuklir Iran JCPOA. Tingkat analisisnya adalah regional yaitu Kawasan Timur Tengah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari data maupun informasi dari berbagai sumber. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa teks, arsip, maupun dokumen-dokumen penting yang dapat diterima keabsahannya seperti terbitan institusi pendidikan, pemerintahan, maupun teks dari situs-situs resmi pemerintahan negara yang bersangkutan diantaranya Arab Saudi, Iran dan Amerika yang nantinya akan diolah kembali oleh penulis untuk dianalisis.

Untuk sumber data sekunder penulisan ini berasal dari berbagai sumber tulisan diantaranya buku, jurnal, penelitian ilmiah seperti skripsi, thesis, dan disertasi yang dinilai valid untuk membantu menganalisis serta mendukung argumen-argumen dalam tulisan ini. Selain itu, penulis juga mengolah data dari situs-situs resmi media nasional maupun internasional sebagai data pendukung untuk mengemukakan fakta-fakta yang diinginkan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memilah data-data yang dianggap relevan dengan topik yang penulis angkat sehingga dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Data yang telah diseleksi ini

kemudian disajikan baik dalam bentuk narasi ataupun kutipan yang dianalisis kembali dengan menggunakan konsep-konsep yang dipakai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pertama dengan menggunakan kerangka berpikir hegemoni regional Mearsheimer, di mana Arab Saudi sebagai negara *great power* yang mendominasi suatu sistem, yaitu regional Timur Tengah, mencoba untuk mencegah lahirnya *great power* di kawasan yang sama, yaitu Iran melalui kesepakatan nuklirnya dengan P5+1. Tindakan Arab Saudi dalam merespon hal ini yang penulis kaji dengan menggunakan konsep Stephen M. Walt mengenai *balancing* dan *bandwagoning*. Namun sebelum menentukan dan mendeskripsikan apakah respon Arab Saudi akan ancaman yang ditimbulkan Iran, perlu diketahui sejauh mana ancaman tersebut dengan empat indikator, yaitu *Aggregate Power*, *Geographic Proximity*, *Offensive Capabilities*, dan *Aggressive Intention*. Kemudian penulis akan melihat tindakan-tindakan Arab Saudi dalam menanggapi ancaman tersebut, kemudian menganalisisnya dengan karakteristik *balancing* dan *bandwagoning*. Dengan demikian, penulis dapat mendeskripsikan bagaimana respon yang dilakukan Arab Saudi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dinamika Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Kawasan Timur Tengah

BAB ini menjelaskan tentang bagaimana dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran sebelum kesepakatan nuklir tercapai pada tahun 2015 hingga 2016 dimana JCPOA mulai di implementasikan

BAB III *Kesepakatan Nuklir Iran dengan P5+1*

BAB ini mendeskripsikan bagaimana kesepakatan nuklir Iran dapat dicapai dan menjelaskan bagaimana kesepakatan ini menjadi ancaman bagi Arab Saudi.

BAB IV *Respon Arab Saudi Dalam Menghadapi Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA)*

BAB ini deskripsikan bagaimana Arab Saudi merespon kesepakatan Iran yang dipandang sebagai ancaman. Sebelum melihat respon dari Arab Saudi, sejauh mana ancaman dari Iran akan dilihat dari beberapa faktor. Kemudian respon Arab Saudi akan dianalisis apakah Arab Saudi melakukan *balancing* atau *bandwagoning* menggunakan konsep dari Stephen M. Walts.

BAB V *Kesimpulan*

BAB ini memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

